

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori

2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah satu hasil atau efek dari teknik penyelenggaraan pemerintahan yang juga meliputi barang, jasa, dan regulasi publik. Akibatnya, sifat dan pelaksanaan kebijakan publik selalu dikaitkan dengan berbagai segi keberadaan pemerintahan, terutama bentuk negara, sistem presidensial, dan struktur organisasi pemerintahan. Bentuk negara mempengaruhi substansi dan prosedur pemberitaan publik, khususnya karena peran negara sebagai kendaraan bagi jalannya kebijakan publik. Bangsa adalah organisasi yang menciptakan kerangka otoritas yang berfungsi sebagai saluran untuk dokumen dan sistem pemerintahan serta prosedur kebijakan. Kedua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan kerangka kerja yang dinamis untuk implementasi kebijakan publik (Muchlis, 2018).

Bila dilihat dari segi instrumental, kebijakan publik merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengakui nilai-nilai publik (*public value*). Melalui berbagai prosedur birokrasi, nilai-nilai publik tersebut dapat dicapai. Kebijakan publik pada umumnya berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat, seperti keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan. Mengatasi masalah melalui keterlibatan masyarakat, seperti

mengurangi kemiskinan, pengangguran, kekerasan, dan meningkatkan pelayanan publik.

Kebijakan adalah seperangkat konsep dan ide panduan yang digunakan untuk menguraikan bagaimana suatu pekerjaan akan dilakukan, dikelola, dan bagaimana itu akan dilakukan. Frasa ini dapat digunakan untuk menggambarkan organisasi di sektor pemerintah, swasta, dan nirlaba serta individu. Kebijakan tidak sama dengan persyaratan hukum. Undang-undang yang mengamanatkan pembayaran denda tilang elektronik merupakan salah satu contoh peraturan yang dapat membatasi atau mengatur perilaku. Kebijakan di sisi lain, hanya mengarahkan kegiatan yang paling mungkin menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Istilah "evaluasi kebijakan" dan "peninjauan kebijakan" juga dapat digunakan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan organisasi yang penting yang melibatkan identifikasi berbagai pilihan, seperti aplikasi atau prioritas pengeluaran, dan pertimbangan utama dampak dalam proses pemilihan. Ruang lingkup kebijakan secara alternatif dapat dilihat sebagai manajemen, politik atau ekonomi. Kebijakan dibuat dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Memahami perlunya kebijakan didasarkan pada sejumlah faktor. Menurut Abidin (Handoyo, 2012) ada empat komponen utama kebijakan yaitu tujuan kebijakan, masalah yang dihadapi, tuntutan atau permintaan (*demand*), dan dampak atau hasil yang diantisipasi (*outcomes*).

Thomas Dye (Kadji, 2018:08) "*public policy is whatever government choose to or not to do*" (Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah). Tindakan pemerintah, baik yang diambil maupun

tidak, disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan ini merupakan upaya untuk memahami: (a) apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah; (b) alasan kebijakan tersebut dan bagaimana hal itu akan berdampak masyarakat; dan (c) bagaimana kebijakan publik akan berdampak orang apakah itu dilaksanakan atau tidak.

Pendapat lain yang diungkapkan Friedrich (Wahab, 2021:19) Melihat kebijakan sebagai gerakan yang didukung mengenai individu, perusahaan atau otoritas dalam lingkungan tertentu yang terdiri dari hambatan dan kemungkinan yang ditaklukkan atau dimanfaatkan melalui peraturan yang disarankan yang akan mencapai suatu maksud.

Dari beberapa pengertian kebijakan publik di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah aturan atau program yang tepat dibuat oleh pemerintah untuk meraih mimpi yang diinginkan dan pola gerak yang diputuskan melalui pemerintah dan diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kebijakan publik, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai cara merupakan komponen penting dari sebuah pemerintahan. Pemerintah mampu dan berdaya untuk melindungi masyarakat melalui kebijakan. Proses pengaturan ini dibantu oleh penerapan hukum pada masyarakat. "Masyarakat manusia" yang memiliki hak hukum untuk menggunakan kekuatan fisik di wilayah tertentu adalah negara. Menurut Max Weber (Muchlis, 2014:02), masalah utama yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak terkait dengan peraturan pemerintah. Pemerintah yang

merupakan negara yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan warganya harus memperhatikan dan melakukan kontrol atas persoalan tersebut karena bentuknya yang bermacam-macam. Dengan menegakkan kebijakan publik, kehadiran negara, seperti yang ditunjukkan oleh bentuk pemerintahannya, mengendalikan rakyatnya.

Kemampuan mengambil keputusan dan kemudian bertindak atas keputusan tersebut dimiliki oleh pembuat kebijakan. Hasil dari tindakan ini dapat berupa persetujuan, modifikasi, atau bahkan penghapusan. Pilihan pemerintah dipandang memiliki kewenangan yang mengikat bagi semua pihak karena kebijakan yang telah ditetapkan memiliki landasan hukum yang berlaku. Ada lima langkah dalam proses pengembangan kebijakan publik, menurut (Wibawa et al., 2018:22) sebagai berikut:

1) Langkah pertama adalah mendefinisikan masalah

Mengidentifikasi isu-isu yang dihadapi masyarakat kontemporer (*public issues*) merupakan langkah awal dalam proses implementasi kebijakan. Intinya, kebijakan dibuat untuk menangani masalah sosial tertentu. Saat menilai kebijakan publik, menarik untuk mempertimbangkan seberapa banyak mereka dapat membantu menyelesaikan masalah sosial ini.

2) Langkah kedua adalah agenda kebijakan

Pendekatan pemecahan masalah yang optimal kemudian ditentukan untuk masing-masing masalah ini. Ada banyak solusi atau opsi kebijakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Setiap alternatif bersaing untuk dipilih sebagai arah tindakan yang harus diambil untuk memperbaiki

masalah selama tahap perumusan kebijakan, mirip dengan proses memasukkan masalah ke dalam agenda kebijakan.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Salah satu alternatif gagasan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan pada akhirnya dipilih untuk diimplementasikan sebagai tahapan selanjutnya dalam kebijakan publik. Keputusan tersebut didukung oleh mayoritas legislatif, persetujuan direktur agensi, atau keputusan pengadilan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Hanya jika mereka tidak dipraktikkan, program kebijakan akan berubah menjadi preseden yang terkenal. Penentuan tentang program-program kebijakan yang dipilih sebagai alternatif permasalahan harus segera dilakukan, khususnya oleh instansi pemerintah di tingkat bawah. Instansi pemerintah harus memobilisasi sumber daya keuangan dan manusia untuk mengimplementasikan kebijakan. Berbagai kepentingan akan bersaing pada tingkat implementasi ini. Pelaksana dapat mendukung beberapa kebijakan atau menolak yang lain tergantung pada kebijakan yang diterapkan.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada titik ini, akan ditentukan apakah kebijakan yang diadopsi perlu diperiksa atau dianalisis untuk menentukan seberapa baik mereka telah mengatasi masalah saat ini. Pada dasarnya, tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mendapatkan efek yang diinginkan, yang dalam hal ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi. Akibatnya, metrik atau standar dibangun

sebagai dasar untuk menentukan apakah inisiatif publik memiliki efek yang diinginkan.

Sebagaimana dapat disimpulkan dari uraian langkah-langkah pembuatan kebijakan publik di atas, tidaklah mudah untuk melakukannya. Masyarakat dirundung berbagai masalah, oleh karena itu setiap masalah harus ditangani secara efektif dan sesuai dengan keadaan lingkungan setempat. Agar tidak merugikan masyarakat, pembuat kebijakan harus melakukan riset mendalam sebelum mengambil keputusan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum implementasi mengacu pada tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah direncanakan dengan cermat sehingga dapat diwujudkan dengan aktualitas dan kejelasan. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah penting dalam proses pembuatan kebijakan adalah implementasi kebijakan. Berdasarkan George C Edward III model implementasi meliputi: komunikasi, sumberdaya, Deposisi atau pola pikir dan Bentuk birokrasi (Tahir, 2023).

Implementasi diartikan sebagai “kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang dinyatakan dalam suatu keputusan” oleh (Akib, 2010) Langkah ini berusaha menerapkan keputusan untuk membawa perubahan yang diinginkan, apakah itu signifikan atau kecil. Implementasi pada hakekatnya adalah upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program

dilaksanakan. Implementasi adalah proses mengubah keputusan fundamental menjadi tindakan spesifik.

Wahab (Tahir, 2023) lebih lanjut mendefinisikan implementasi sebagai tindakan memberlakukan pertimbangan dasar kebijakan, yang dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, perintah, atau penilaian lainnya. Keputusan eksekutif atau yudikatif yang penting seringkali mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan dan secara tegas menyatakan tujuan yang harus dicapai. Eksekusi kebijakan publik dapat dipandang sebagai topik kajian dalam ilmu administrasi publik menurut Tachjan (Tahir, 2023). Selain itu, implementasi dapat dilihat sebagai salah satu tugas birokrasi (kelembagaan) administrasi publik yang berlangsung selama perumusan kebijakan publik.

Menurut Mazmanian dan Sebastier (Tahir, 2023), ada tiga cara untuk melihat implementasi kebijakan: dari sudut pandang pembuat keputusan, otoritas pelaksana lapangan, dan aktor tertentu yang menjadi populasi sasaran. Menurut kamus Webster, implementasi digambarkan sebagai pemberian cara kepada seseorang untuk melakukan sesuatu dan memberikan pengaruh terhadap sesuatu (Wahab, 2021). Dalam bentuknya yang paling mendasar, implementasi adalah upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh program dalam menjalankan kebijakan. Implementasi menurut Danil A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Wahab, 2021) adalah pemahaman tentang suatu program setelah diartikulasikan atau ditetapkan. Fokus perhatian pemerintah pada implementasi kebijakan mencakup peristiwa dan tindakan yang mengikuti adopsi rekomendasi kebijakan publik,

yang melibatkan upaya untuk mengontrol dan memiliki dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sugiono, 2014), implementasi kebijakan adalah proses mewujudkan keputusan kebijakan mendasar menjadi tindakan. Ini biasanya berbentuk undang-undang, tetapi juga dapat dicapai dengan arahan eksekutif atau putusan yudisial yang signifikan. Pilihan ini menguraikan masalah yang akan dipecahkan, maksud atau tujuan yang akan dicapai, dan berbagai metode yang digunakan untuk menentukan atau mengendalikan bagaimana hal itu akan dilaksanakan. Salah satu fase terpenting dari siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Mengikuti pengenalan undang-undang dan peraturan yang mengesahkan program, kebijakan, atau hasil tertentu, sejumlah tindakan diambil yang dikenal sebagai implementasi. Menurut Syafie, (2011), implementasi ini memerlukan keterlibatan instansi pemerintah dan berkaitan dengan pencapaian tujuan dan hasil program. Implementasi ini juga mengacu pada penerapan hukum yang mengatur kebijakan, prosedur, atau hasil (*outcome*) yang transparan dan nyata (fisik).

Uraian ini mengarah pada kesimpulan umum bahwa implementasi kebijakan merupakan proses dinamis yang melibatkan berbagai kepentingan. Hasil jangka panjang dari implementasi kebijakan diharapkan sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan yang berfokus pada masyarakat.

2.1.3 Model Implementasi Kebijakan

Model kebijakan publik adalah penggambaran atau gambaran fiktif dari proses politik. Model-model ini berusaha mengklarifikasi, mendekonstruksi, dan menawarkan pemahaman tentang isu-isu yang dipandang krusial dalam politik dan urusan publik. Kriteria dan metode yang digunakan untuk menjelaskan kehidupan politik dan kebijakan publik menentukan seberapa penting sebuah model dalam melakukannya. Saat ini, berbagai disiplin akademis memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana kebijakan diimplementasikan. Ada banyak model yang digunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sebagai pedoman. Variabel aparatur dan masyarakat yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan juga akan berdampak terhadapnya.

A. Model Kebijakan Van Metter dan Van Horn.

Model *top-down* Van Metter dan Van Horn untuk strategi implementasi kebijakan adalah model *top-down*. Proses implementasi kebijakan ini merupakan hasil dari implementasi kebijakan publik yang bertujuan untuk menghasilkan kinerja implementasi publik yang sesuai dengan harapan yang terkait dengan banyak faktor. Model ini menunjukkan bagaimana kebijakan diimplementasikan secara linier, dimulai dari keputusan politik yang dapat dibuat, melalui implementasi kebijakan hingga mencapai kinerja kebijakan publik.

Menurut Van Metter & Van Horn (Muchlis, 2014) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja dalam implementasi kebijakan publik, antara lain:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Hanya jika ukuran dan tujuan kebijakan masuk akal mengingat lingkungan sosiokultural pada tingkat implementasi kebijakan, kinerjanya dapat dievaluasi dalam hal seberapa berhasil kebijakan tersebut. Akan sulit untuk berhasil mengimplementasikan kebijakan publik ke titik di mana mereka dapat dianggap efektif jika skala atau tujuan kebijakan terlalu idealis (atau terlalu utopis) untuk diterapkan oleh masyarakat.

2) Sumber-Sumber Kebijakan

Ketersediaan sumber daya juga harus dipertimbangkan selama proses implementasi kebijakan, bersama dengan ukuran dan tujuan kebijakan. Sumber daya ini sangat penting dalam menentukan seberapa baik kebijakan publik dijalankan. Pendanaan dan bentuk bantuan lain yang dapat mendorong dan membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah secara efisien termasuk dalam sumber daya yang dimaksud. efektif.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Entitas resmi dan informal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik termasuk dalam fokus lembaga pelaksana. Hal ini penting karena sifat dan kesesuaian yang tepat dari agen pelaksana memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan publik.

4) Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana

Tingkat keberhasilan eksekusi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Hal ini disebabkan kemungkinan kebijakan yang diambil tidak berasal dari

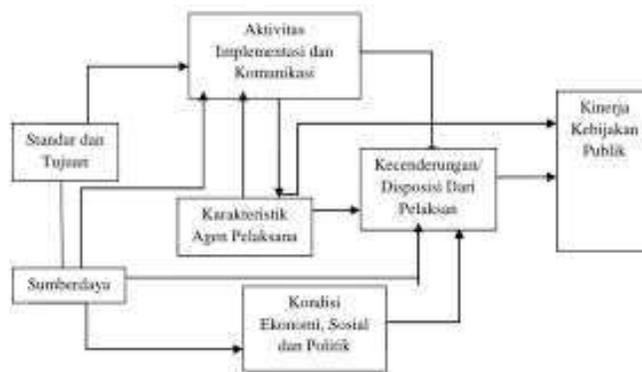
masyarakat lokal yang benar-benar memahami persoalan dan tantangan yang mereka hadapi.

5) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan

Jika penanggung jawab pelaksana kebijakan memahami langkah-langkah dan tujuan kebijakan, implementasi akan berjalan dengan lancar. Untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, sangat penting bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut bekerja sama dengan baik dan berkomunikasi dengan baik.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Sejauh mana lingkungan mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan merupakan faktor terakhir yang mempengaruhi seberapa baik kebijakan publik diimplementasikan dan harus diperhitungkan saat mengevaluasi hasil implementasinya. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik terlibat dalam hal ini.



Gambar 2.1 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

B. Teori Sabatier

Menurut Sabatier, kebijakan harus ditinjau dalam siklus yang berlangsung lebih dari sepuluh tahun. Banyak variabel yang memengaruhi kebijakan, yang sebagian besar mudah ditentukan saat menggunakan pendekatan *top-down*. Diantaranya termasuk lingkungan sosial ekonomi, sistem peradilan, dan susunan fundamental pemerintahan.

C. Teori Matland

Literatur implementasi kebijakan menyatakan bahwa berbagai jenis kebijakan diselidiki menggunakan teknik *top-down* dan *bottom-up*. Mereka yang menyukai kebijakan yang menjelaskan diri sendiri menyukai pendekatan *top-down*, sedangkan mereka yang menyukai kebijakan yang lebih ambigu menyukai pendekatan dari bawah ke atas. Model ambiguitas/konflik diusulkan oleh Matland sebagai rencana cadangan.

D. Teori George C. Edward III

Salah satu langkah penting dalam pembuatan kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Sebaik apapun tahapan atau prosedur yang telah ditetapkan dan direncanakan, akan sia-sia jika tidak dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu langkah implementasi sangatlah penting. Faktor penentu utama dalam proses penetapan kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Elemen ini sangat penting karena, sebaik apa pun suatu kebijakan, akan gagal jika tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati. Oleh karena itu, tidak mungkin menerapkan kebijakan publik sebelum alokasi anggaran yang

sesuai dibuat untuk mendukung pembiayaan pelaksanaannya, serta sebelum undang-undang atau peraturan dibuat.

Paradigma George C. Edward dalam mengimplementasikan kebijakan mengikuti metodologi *top-down*. George C. Edward mengklaim bahwa ada empat faktor yang secara signifikan mempengaruhi seberapa baik kebijakan pemerintah diimplementasikan. Keempat faktor tersebut adalah struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, dan komunikasi. Penulis dapat mengidentifikasi hambatan potensial untuk pelaksanaan keberhasilan kebijakan dengan mengenali empat elemen ini (Leo, 2018) sebagai berikut:

1) Komunikasi

Menurut Edward III, komunikasi sangat penting dalam menentukan seberapa baik kebijakan publik diimplementasikan. Ketika pembuat keputusan sepenuhnya menyadari langkah-langkah yang harus diikuti, implementasi menjadi efektif. Selain itu, menunjukkan bahwa komunikasi berhasil jika pelaksana kebijakan memahami apa yang perlu dilakukan dan telah melakukan langkah-langkah tersebut. Oleh karena itu, setiap pilihan kebijakan dan aturan pelaksanaan harus dikomunikasikan secara efektif kepada individu yang bersangkutan. Kebijakan yang harus dinyatakan juga harus tepat, akurat, dan konsisten.

2) Sumber Daya

Edward III mengklaim bahwa sumber daya adalah faktor selanjutnya yang mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. Jika orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan tidak memiliki

alat yang tepat, bahkan ketika instruksi telah disampaikan dengan tepat, cepat, dan konsisten, implementasinya kemungkinan besar akan gagal. Oleh karena itu sumber daya merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang disebutkan termasuk sumber daya keuangan dan personel dengan bakat dan keterampilan yang relevan dalam disiplin terkait.

Pemerintah sering kesulitan menemukan pegawai dengan kemampuan manajerial yang diperlukan. Profesional yang dipromosikan ke posisi administratif terkadang kehilangan kemampuan untuk menggunakan keahlian profesionalnya. Keterbatasan dalam kemampuan manajemen merupakan masalah signifikan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dan nasional. Ini karena tidak ada sumber daya yang cukup untuk pelatihan profesional.

3) Disposisi

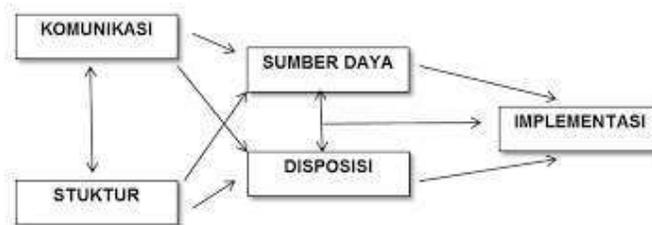
Selanjutnya, Edward III mengklaim bahwa disposisi merupakan faktor ketiga yang dapat mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. Cara pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kepribadian atau sikap dari mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya sesuai dengan bidangnya agar implementasi kebijakan dapat efektif. Alhasil, proses implementasi kebijakan bisa berjalan tanpa hambatan.

4) Struktur Birokrasi

Salah satu kelompok atau lembaga yang sering melakukan implementasi kebijakan adalah birokrasi. Efektivitas pelaksana kebijakan terhalang oleh struktur organisasi mereka yang tidak efektif bahkan ketika sumber daya

tersedia, mereka memahami tugasnya, dan mereka ingin memenuhinya. Proses implementasi kebijakan dapat terhambat oleh struktur organisasi yang membatasi aktivitas yang dapat dilakukan sehubungan dengan kebijakan tersebut, meskipun pelaksana sudah mengetahui apa yang perlu dilakukan dan memiliki motivasi dan sumber daya untuk melakukannya.

Setelah memperhatikan penjelasan di atas, maka peneliti akan memaparkan gambaran keempat variabel pendukung implementasi kebijakan menurut Edward III pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Variabel Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Meskipun tahap implementasi memberikan hasil, program atau kebijakan mungkin tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam beberapa keadaan, kedua bagian tersebut sebenarnya bisa gagal. Hal ini disebabkan oleh beberapa penyebab, menurut Anderson (Muchlis, 2014), antara lain.:

- 1) Keterbatasan sumber daya

- 2) Kurangnya ketepatan dalam implementasi
- 3) Kebijakan yang hanya mengatasi satu faktor dari berbagai masalah publik yang kompleks
- 4) Respons yang tidak memaksimalkan dampak yang diinginkan dari kebijakan
- 5) Tujuan kebijakan yang tidak sejalan
- 6) Biaya implementasi yang melebihi manfaat yang diperoleh dari penyelesaian masalah
- 7) Tidak dapat menyelesaikan banyak masalah umum
- 8) Munculnya masalah baru yang menyebabkan perubahan tindakan
- 9) Pemecahan masalah yang tidak tepat atau tidak efektif

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Bambang Irawan Dan Ahmad Fikri (2016) (Irawan & Fikri, 2022)	Dampak Layanan Informasi Melalui Aplikasi Untuk Asisten Pelayanan Informasi Cepat Kecamatan Kelas Ii Di Pengadilan Kabupaten	Kualitatif	Hasil dari penelitian tersebut berdampak positif, dengan adanya aplikasi ALICE memudahkan masyarakat karena tersedianya informasi sehingga mendorong

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
		Tanah Grogot, Kabupaten Paser		partisipasi masyarakat lebih aktif, tidak terjadinya korupsi administrasi dan praktek pencaloan dikarenakan tidak adanya pertemuan antara masyarakat dan aparat.
2	Rizaldy Tumbel Burhanuddin Kiyai Rully Mambo (2021)(RIZALDY TUMBELBURHANUDDIN KIYAIRULLY MAMBO, 2021)	Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa	Kualitatif	Temuan studi menunjukkan bahwa kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kondisi ekonomi masyarakat miskin hanya memberikan sedikit dukungan terhadap tingkat pendapatan mereka selama pandemi. Namun, ada beberapa masalah dengan bagaimana program ini dilaksanakan. Salah satunya adalah ketidakakuratan data yang mengakibatkan program tidak mengikutsertakan semua penduduk miskin. Selain

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				itu, ada keterlambatan dalam prosedur pembayaran dan beberapa permintaan penerima bantuan tidak diperhitungkan saat mengelola bantuan. Hasilnya, program bantuan keuangan langsung pemerintah belum sepenuhnya memiliki efek yang diharapkan.
3	Risma Septari Amiri Salmin Dengo Very Y. Londa (2019)(Amiri et al., 2017)	Dampak Kebijakan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Kepulauan Nain Kabupaten Minahasa Utara	Kualitatif	Populasi Pulau Nain belum terpengaruh secara signifikan oleh temuan penelitian. Hal ini terutama karena penekanan program bantuan masih semata-mata pada hubungan interpersonal dan karena komunikasi yang kurang antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, masyarakat kurang antusias membantu dunia

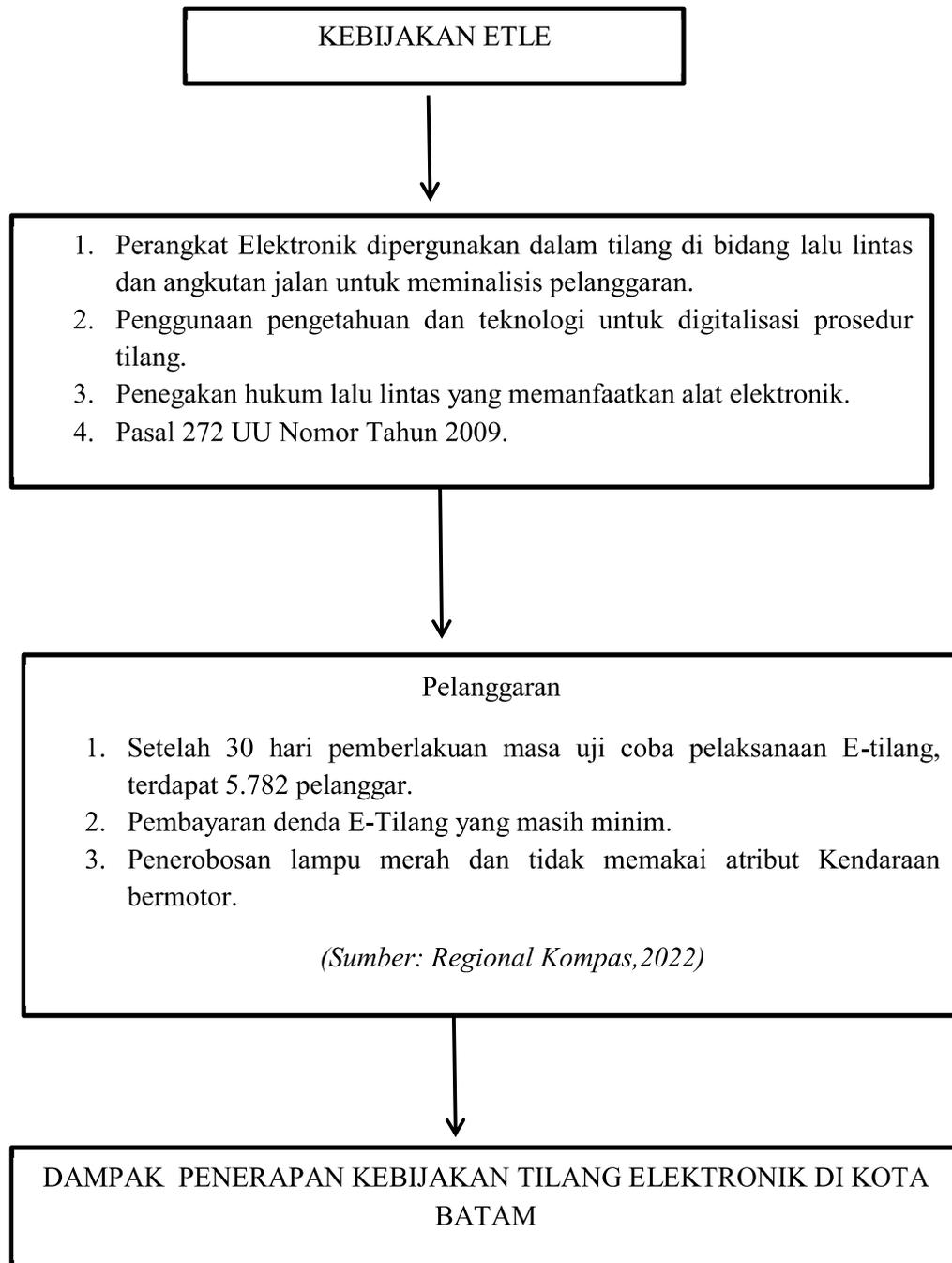
No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				usaha karena minimnya keterampilan, dan pemerintah kurang aktif memantau pelaksanaan program tersebut.
4	Marsekaldo Rivaldo Manzanaris Joyce J Rares Burhanuddin Kiyai (2019)(Manzanaris et al., 2018)	Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Rawajaya Di Wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara	Kualitatif	Hasil penelitian bahwa dalam lingkup pasar, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan (UPTD) sehingga hal-hal terkait pasar teknis Rencana kerja Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, aturan administrasi teknis, praktik retribusi, dan program tindak lanjut semuanya termasuk dalam pasar teknis. Ini membahas masalah permintaan, kebersihan, keamanan, manajemen, kontrol, dan administrasi yang terkait dengan pasar.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
5	Jevanly Onibala .J.H.Posumah Very Londa (2022)(ONIBALA et al., 2021)	Dampak Kebijakan Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Pt. Geothermal Bagi Masyarakat Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa	Kualitatif	Hasil penelitian ber dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah Melalui pemberdayaan CSR-CSR PGE, masyarakat mengalami peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan masyarakat Selain itu, dari segi ekonomi, terdapat kesempatan kerja di PGE yang berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan memungkinkan pendapatan yang diperoleh digunakan sebagai modal usaha serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran dan dampak negatifnya ialah kebisingan dari kegiatan eksplorasi PGE memiliki efek

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				yang merugikan..
6	Benyamin Banga Padang Masje S. Pangkey Alden Laloma (2022)(Tumurang et al., 2018)	Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Megamas Bagi Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Wenang Kelurahan Wenang Selatan Kota Manado	Kualitatif	Hasil penelitian adalah Karena banyak masyarakat lokal, khususnya masyarakat nelayan yang kondisi ekonomi nelayannya sedang terpuruk, terus menanggung dampak reklamasi pantai di kawasan Megamas terus melanggar aturan yang ada. Meskipun demikian, strategi pemulihan memang dapat menggerakkan perekonomian kota Manado dengan menjadikan kawasan pemulihan sebagai kawasan bisnis.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
7	Gerry Alfero Kalampong Alden Laloma Helly Kolondam (2018)(GERRY ALFERO KALAMPUNGALDEN LALOMAHHELLY KOLONDAM, 2020)	Dampak Kebijakan Pembangunan Perumahan (Studi Di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)	Kualitatif	Hasil penelitian adalah Strategi kemajuan penginapan di Ocean Town secara tegas memengaruhi masalah publik dan pada tujuan pengumpulan strategi, yaitu membantu orang-orang yang tidak memiliki rumah untuk mendapatkannya kredit rumah dengan porsi yang wajar, dan di area yang membantu dan aman. Rasa aman dan nyaman masyarakat tidak terpengaruh oleh pembangunan rumah. Dampak utama yang tidak dapat diantisipasi adalah berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan masyarakat.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pemikir